



MASIH ANTRE: Sejumlah warga antre membeli gas/elpiji 3 kilogram di Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Rabu (5/2/2025). Antrean pembelian elpiji 3 kg masih terjadi sebab stok di warung-warung sekitar masih kosong pascainstruksi Presiden Prabowo Subianto yang memperbolehkan kembali penjualan gas subsidi di tingkat pengecer.

KR-Antara/Putra M Akbar

PRESIDEN PUTUSKAN

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto memutuskan, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo membahas kelanjutan Program PKG sebagai salah satu program unggulan Kabinet Merah Putih di bidang kesehatan.

“Ini adalah program cek kesehatan gratis, diputuskan oleh beliau (Presiden Prabowo) nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus Puskesmas dan juga

klinik-klinik. Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu Puskesmas,” kata Menkes Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2).

Budi menegaskan, Program PKG akan menyasar semua kelompok usia dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diproyeksikan bisa menjadi penerima manfaat. Program PKG akan dilaksanakan dengan dua grup dibatasi usia, ter-

diri atas grup usia di bawah sekolah atau 6 tahun ke bawah dan grup usia di atas 6 tahun.

Sebagai program inisiasi, pada tahap awal Program PKG ada sebanyak 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik.

“Nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus satu bulan. Khusus yang Januari, Februari, Maret, boleh sampai April,” kata Budi seraya menambahkan, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan sesuai kebutuhan usia.

Menkes menjelaskan secara lebih rinci, untuk kelom-

pok bayi yang baru lahir akan menjalani enam pemeriksaan kesehatan, lalu untuk balita ada delapan jenis pemeriksaan kesehatan.

Selanjutnya untuk kelompok anak-anak Sekolah Dasar (SD) akan menjalani 11 jenis pemeriksaan, disusul remaja atau yang duduk di SMP 13 jenis pemeriksaan, dan untuk remaja di SMA ada 12 jenis pemeriksaan. Terakhir untuk kelompok usia dewasa dan lanjut usia nantinya akan ada 19 jenis pemeriksaan yang bisa didapatkan dari Program PKG.

(Ant/San)-d

Danais DIY

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Danais DIY), dan Dana Desa.

Untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, dilakukan pemangkasan Rp 13,90 triliun dari pagu awal Rp 27,81 triliun. Alokasi DAU dipangkas Rp 15,68 triliun dari pagu Rp 446,63 triliun. Maka, nilai yang akan ditransfer nantinya menjadi Rp 430,96 triliun. DAK fisik semula dianggarkan Rp 36,95 triliun, namun dipangkas Rp 18,31 triliun sehingga menjadi Rp 18,65 triliun. Pemangkasan itu dilakukan terhadap DAK Fisik Bidang Konektivitas Rp 14,6 triliun, Bidang Irigasi Rp 1,72 triliun, Bidang Pangan Pertanian Rp 675,33 miliar, dan Bidang Pangan Akuatik Rp 1,31 triliun.

Rasakan

Saya merasa nyaman di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Saya merasa nyaman dan aman,” jelas Prabowo.

Presiden mengaku mendapat energi baru setelah masuk ke dalam lokasi acara peringatan Harlah NU ini. Bahkan, ada kekuatan baru yang dirasakan. Diakui, dirinya memiliki kedekatan dengan ulama. Ia beralasan memang prajurit tentara itu sangat dekat dengan kiai karena kelak berhadapan dengan maut.

Menurut Ketua Umum Pengurus

Dana Otsus dipangkas Rp 509,46 miliar dari pagu awal Rp 14,52 triliun, menjadi Rp 14,01 triliun. Rinciannya, Dana Otsus Papua menjadi Rp 9,7 triliun dan Dana Otsus Aceh Rp 4,31 triliun. Sementara itu, Dana Keistimewaan (Danais) DIY dipangkas Rp 200 miliar dari pagu awal Rp 1,2 triliun, sehingga total alokasi Danais DIY menjadi Rp 1 triliun.

Terakhir, anggaran Dana Desa dipangkas Rp 2 triliun dari pagu Rp 71 triliun. Maka, alokasi Dana Desa menjadi Rp 69 triliun.

Diktum kedelapan KMK tersebut menyatakan pemangkasan anggaran yang disebut sebagai cadangan itu akan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas Pemerintah. KMK berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Februari 2025.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres No 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran Pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas Rp 306,69 triliun. Rinciannya, anggaran Kementerian/Lembaga diminta untuk efisiensi Rp 256,1 triliun dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat. Disebutkan, Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud.

(Ant/San)-d

Kebijakan

Tentu saja ini menjadikan tambahan beban bagi masyarakat karena harga yang mereka bayarkan lebih tinggi daripada seharusnya.

Nah, mulai 1 Februari 2025, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan baru terkait distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi. Dalam kebijakan ini, pengecer dilarang menjual LPG 3 kg, dan masyarakat hanya bisa membelinya melalui pangkalan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Tujuan kebijakan ini adalah pemerintah ingin memastikan harga LPG 3 kg tetap sesuai HET yang telah ditetapkan. Dengan menghapus pengecer, diharapkan tidak ada lagi harga yang jauh lebih tinggi dari ketentuan pemerintah akibat rantai distribusi yang panjang. Selain itu kebijakan ini juga untuk memperbaiki sistem distribusi agar tepat sasaran.

Seiring dengan meningkatnya permintaan LPG, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan LPG 3 kg di sektor industri, komersial, dan restoran. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan LPG 3 kg di luar sasaran, sehingga LPG bersubsidi tetap tersedia un-

tuk masyarakat yang membutuhkan. Industri besar, restoran, dan sektor komersial diwajibkan untuk menggunakan LPG dengan kapasitas lebih besar, seperti LPG 12 kg atau 50 kg, yang tidak mendapatkan subsidi.

Lalu, bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Dampak yang dirasakan oleh masyarakat antara lain adalah pertama, masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai HET sehingga tidak ada lagi pengecer yang ada di warung kecil.

Kedua, distribusi LPG 3 kg akan lebih terkontrol, mengurangi potensi kelangkaan atau penimbunan. Ketiga, pembelian hanya dilakukan di tempat resmi, sehingga memerlukan penyelesaian bagi mereka yang terbiasa membeli di pengecer atau warung kecil.

Kemudian bagaimana pengecer yang tetap ingin menjual gas melon ini? Para pedagang pengecer tetap dapat menjual LPG 3 kg ini dengan syarat statusnya dinaikkan menjadi pangkalan resmi dengan cara mendaftarkan sebagai pangkalan resmi melalui sistem Online Single Sub-

mission (OSS). Syarat utama untuk mendaftar di OSS adalah para pedagang harus memiliki surat Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg agar tidak terjadi penyelewengan dan penimbunan. Penyaluran LPG 3 kg dilakukan melalui agen dan pangkalan yang telah terdaftar dan mendapat izin dari pemerintah. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi dalam distribusi dan mengurangi kesenjangan harga di berbagai daerah.

Namun baru empat hari kebijakan ini diberlakukan, tepatnya pada hari Selasa, 4 Februari 2025 Wakil Ketua DPR RI Sufrmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas kebijakan penjualan LPG 3 kg ini. Dalam bahasannya Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan agar Kementerian ESDM mengaktifkan kembali pedagang eceran untuk menjual LPG 3 kg mulai hari Selasa 4 Februari 2025. Rencananya pengecer akan menjadi sub pangkalan. Untuk

harga yang tinggi di tingkat pengecer, pemerintah akan membuat aturan terkait harga agar tidak melanggar yang aturannya secara parsial akan diselarskan di kemudian hari.

Alasan kuat Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer diperbolehkan berjalan kembali adalah karena kondisi di lapangan yang terjadi adalah menimbulkan antrean yang panjang di pangkalan dan ditambah beban administratif dikarenakan masyarakat harus membawa fotocopy KTP. Selain juga kesulitan masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 kg ini. Dasco juga memastikan bahwa stok LGP 3 kg tidak langka dan terdistribusi dengan aman dan lancar.

Semoga dengan instruksi Presiden Prabowo dengan memperbolehkan kembali pedagang ecerean ini dapat menghilangkan antrean panjang di pangkalan dan distribusi LPG 3 kg dapat merata hingga ke desa-desa. Semoga harga pada tingkat konsumen akhir juga dapat dikontrol sehingga tidak membebani masyarakat yang tidak mampu.-d

(Penulis, Dosen Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta)

PERTEMUAN TAHUNAN UTDI
Hasto Wardoyo Jadi Dewan Pertimbangan



KR-Istimewa

Hasto Wardoyo dan Teguh Wijono BP.

YOGYA (KR) - Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta sebagai Badan Penyelenggara UTDI menyelenggarakan Pertemuan Tahunan, Selasa (4/2), untuk membangun komitmen, sinergi dan kolaborasi semua unsur organisasi di UTDI.

Pertemuan dihadiri lengkap semua unsur yang terdiri Badan Penyelenggara (Yayasan), Dewan Pertimbangan, Senat dan Pimpinan (Rektor beserta jajarannya). Yang dibahas langkah-langkah strategis mengembangkan UTDI serta menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

Pertemuan dibuka Ketua Yayasan Ir Teguh Wijono Budi Prasetyo MM dilanjutkan paparan Rektor UT-DI Sri Redjeki SSi MKom PhD dan pandangan serta arahan dari Dewan Pertimbangan UTDI.

Dalam pertemuan terse-

but sekaligus mengukuhkan dr Hasto Wardoyo SpOG (Walikota Yogyakarta Terpilih) sebagai Anggota Dewan Pertimbangan UT-DI menggantikan almarhum Prof Sudjarwadi MSc PhD. Penyerahan SK oleh Ketua Yayasan kepada Hasto Wardoyo. Saat ini Dewan Pertimbangan UT-DI berjumlah empat orang yaitu GBPH Drs Yudhaningrat MM, dr Hasto Wardoyo SpOG, H Abdul

Halim Muslih dan H Muchammad Agus Hanafi SH. “Terima kasih atas kepercayaan UTDI dan Insya Allah ke depan Pemkot Yogya siap bersinergi,” ucap Hasto. Sementara Teguh Wijono memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh unsur organisasi UTDI yang telah hadir. “Pertemuan ini menjadi energi baru untuk menyongsong masa depan dengan penuh optimisme,” pungkasnya. (Sal) -f

SULTAN PANGGIL BUPATI/WALIKOTA TERPILIH
5 Jam Bahas Efisiensi Anggaran dan Sampah

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengumpulkan kepala daerah terpilih di DIY di Gedhong Wilis, Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (5/2).

Dalam pertemuan tertutup selama 5 jam (pukul 08.30-13.30 WIB) tersebut, dibahas berbagai isu strategis seperti efisiensi anggaran, sampah dan program pembangunan daerah.

Hadir Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Abdul Halim Muslih dan Haris Suharyanta, Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Terpilih Endah Subekti dan Joko Parwoto, Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Terpilih Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan, serta Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo Terpilih Agung Setiawan dan Ambar Purwoko. Sedangkan Bupati Sleman Terpilih Harda Kiswaya hadir tanpa didampingi wakilnya, Danang Maharsa.

Ditemui se usai pertemuan, Hasto Wardoyo mengatakan, selain efisiensi anggaran, Sultan juga menyoroti masalah sampah sebagai isu utama yang perlu segera diatasi. Gubernur DIY optimis persoalan sampah akan lebih cepat teratasi karena adanya pembangunan sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantul yang bisa dimanfaatkan. Sehingga seharusnya ke depan

masalah sampah bisa diselesaikan lebih cepat. “Kalau untuk Kota Yogya efisiensi anggaran akan dialokasikan untuk penanganan sampah dan lingkungan. Sampah atau lingkungannya harus ada refocusing atau konvergensi, jadi mengerucut ke arah sampah. Itu salah satunya menjadi prioritas karena sampah itu juga bagian dari lingkungan dan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia,” paparnya.

Menurut Abdul Halim Muslih, Sultan HB X menekankan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh serta memahami perubahan yang tengah terjadi. Program Pemerintah diharapkan lebih bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat. Sultan juga mengingatkan kepala daerah terpilih agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan, namun tetap progresif dalam menjalankan program pembangunan.

“Di Bantul, langkah efisiensi yang sedang dilakukan meliputi pemangkasan perjalanan dinas, pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), serta pengurangan anggaran makan dan minum. Hasil dari refocusing ini nantinya akan dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan serta perbaikan infrastruktur guna mengatasi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan desa,” paparnya. (Ria)-f

Delapan

Polri membuka posko Disaster Victim Identification (DVI) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Bogor, Jawa Barat untuk mengidentifikasi korban. “Setelah terjadi kecelakaan, Polri membuka posko DVI untuk menjalankan proses antemortem untuk keperluan identifikasi korban. Lokasinya ada di depan kamar jenazah RSUD Ciawi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Brigjen Pol Trunoyudo mengatakan bahwa RSUD Ciawi telah membuka call center untuk merespons cepat pencarian informasi bagi ma-

syarakat yang mungkin menjadi keluarga korban. “Masyarakat yang ingin mencari informasi bisa mendatangi posko kami di RSUD Ciawi. atau bisa menghubungi call center RSUD Ciawi di nomor 08111113622,” ucapnya.

Saat ini sudah ada lima dari 11 korban luka-luka yang dipulangkan. Sisanya enam orang masih dirawat di RSUD Ciawi. Tiga orang luka sedang dan tiga orang luka berat. Sementara delapan korban meninggal dunia masih berada di ruang jenazah RSUD Ciawi karena masih dalam identifikasi antemortem oleh tim Dokkes Polda Jawa Barat dan tim Inafis.

(Ant/Has)-f

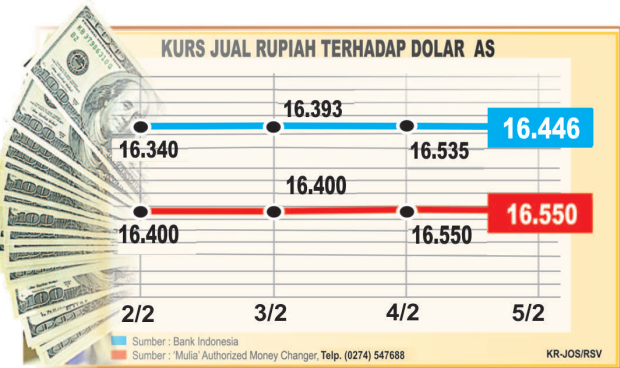
Penembakan

Sementara Duta Besar RI untuk Swedia dan Latvia Kamapradipta Isnomo mengonfirmasi tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak penembakan massal di satu sekolah di

Orebro Swedia. “KBRI sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Swedia, mereka masih melakukan identifikasi korban dan sejauh ini tidak ada WNI,” ungkapny, Rabu (5/2).

KBRI Stockholm juga telah menjalin komunikasi dengan warga Indonesia yang tinggal di Swedia, dan 27 orang di antaranya tinggal di Orebro.

(Ant/Has)-d



Prakiraan Cuaca					Kamis, 6 Februari 2025
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C
Bantul					22-30
Sleman					22-29
Wates					22-29
Wonosari					22-30
Yogyakarta					22-30
Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir					

Grafis : Arko